



## Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

### *Analysis of the Effect of Oligarchy on Democracy and Human Rights in Indonesia*

Ismayani<sup>1</sup>, Yusri<sup>2\*</sup>, Pantas Sianturi<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

<sup>2</sup>STIE Graha Kirana Medan

Corresponding author\*: [yusrish@gmail.com](mailto:yusrish@gmail.com)

#### Abstrak

Oligarki pertama kali hadir di Indonesia saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu beliau dikenal sebagai seorang pemimpin oligarki karena membagikan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam Indonesia kepada orang-orang setia atau pada kelompok-kelompok tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh yaitu: 1) Pengaruh oligarki terhadap demokrasi di Indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan sebab Demokrasi semestinya mampu menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos tentu merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif yang kita tahu bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat bukan malah berbalik kepada para pejabat ataupun oligarki politik. 2) Apabila Oligarki masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia.

**Kata Kunci: Analisis: Pengaruh: Oligarki: Demokrasi; Hak Asasi.**

#### Abstract

*Oligarchy first appeared in Indonesia during the reign of President Soeharto. At that time he was known as an oligarchic leader for distributing wealth derived from Indonesia's natural resources to loyal people or to certain groups. The research method used in this writing is the survey research method. The results of the discussion obtained are: 1) The influence of oligarchy on democracy in Indonesia has entered an alarming stage because democracy should be able to become a system of government of the people, by the people and for the people. In this context, democracy without demos is certainly an anomaly, or even contradictory, as we know that the highest power should be in the hands of the people instead of turning to officials or political oligarchs. 2) If the oligarchy enters the political process, it will eliminate the participation rights of citizens. Furthermore, the inclusion of oligarchs in the outcome of the political process greatly influences the level of public welfare in the future. This means that it will have an impact on the fulfillment of human rights.*

**Keywords: Analysis: Influence: Oligarchy: Democracy; Rights.**

## **PENDAHULUAN**

Oligarki adalah struktur pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang dan dijalankan oleh kelompok atau golongan elit kecil dari masyarakat, dan dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata Oligarki identik dengan istilah sedikit dan bersifat memerintah kaum atau golongan yang banyak.

Di Afrika Selatan misalnya sebelum tahun 1994, orang-orang minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki terhadap mayoritas penduduk Afrika Selatan yang berkulit hitam. Politik rasisme ini secara resmi pada 1948 disebut dengan politik apartheid, sampai akhirnya seorang tokoh yang dikenal ialah Nelson Mandela yang menentangnya. Oligarki merupakan kondisi struktural yang penuh ketimpangan. Oligarki dapat menjadi semakin dominan ketika para elit terlibat dalam politik untuk mempertahankan dan memperbesar kekayaan.

Oligarki pertama kali hadir di Indonesia saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu beliau dikenal sebagai seorang pemimpin oligarki karena membagikan kekayaan yang berasal dari sumber daya alam Indonesia kepada orang-orang setia atau pada kelompok-kelompok tertentu.

Pada saat Orde Baru tumbang dan beralih menjadi reformasi, sistem demokrasi hadir di Indonesia karena bertujuan untuk pemeratakan kekuasaan dan ekonomi di wilayah yang masih memiliki ketimpangan namun nyatanya justru berjalan di arah yang sebaliknya. Sebab demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki yang dominan dalam partai dan kekuasaan dipemerintahan sehingga semakin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Dalam kondisi seperti ini sistem politik menjadi dikuasai oleh segelintir elit yang memerintah dan mengontrol konsentrasi massa yang masif serta sumber daya finansial untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial mereka. Semakin berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia justru semakin membuat oligarki merajalela.

Namun hal itu bukan karena sistem demokrasi yang salah, melainkan penegakan hukum yang lemah. Dapat kita saksikan jika penegakan hukum di Indonesia ditegakkan ketika yang sedang dihadapi adalah rakyat lemah. Namun ketika yang dihadapi kaum oligarki, maka penegakan hukum seolah menjadi melunak atau bahkan menjadi tak berfungsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian Survey. menurut Sugiyono penelitian survey berarti penelitian terhadap populasi besar atau kecil dengan mempelajari sampel data yang berasal dari populasi. Tujuannya adalah untuk menghadirkan kejadian yang relatif, distribusi, dan berkaitan erat antar variabel psikologis dan juga sosiologis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Oligarki terhadap Demokrasi**

Oligarki dalam suatu partai dan negara merupakan suatu kelompok minoritas yang memimpin kaum mayoritas. Hal ini dapat terjadi jika misalnya kelompok minoritas ini adalah penyandang dana terbesar didalam suatu partai. Sehingga terpilihnya seseorang

menjadi pimpinan atau posisi strategis didalam suatu partai ialah tergantung dari kontribusi berapa jumlah kekayaan yang dia miliki, bukan berdasarkan kemampuan dan integritas yang dimiliki dari individu tersebut.

Hal ini jika diabaikan selama berkepanjangan, maka akan mengancam kehidupan demokratis di Indonesia. Hadirnya partai politik dalam suatu negara adalah sebagai instrumen vital dalam penegakan demokrasi itu sendiri.

Tapi sayangnya sejak pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, saat semua instrumen lain dari bangsa ini sudah mulai memperbaiki diri pasca pemerintahan orde baru hanya tersisa partai politik yang belum mau untuk memperbaiki diri. Seharusnya dalam sistem demokrasi, partai politik itu memiliki fungsi untuk mewakili aspirasi masyarakat. Tapi kenyataannya, partai politik ada untuk mengaspirasi sekelompok elit didalam partainya.

Tentu ini mengakibatkan ketika suatu partai seakan menganut sistem oligarki maka akan terjadi pembungkaman suara rakyat. Para elit oligarki, membutuhkan rakyat guna memperoleh suara atau dukungan, maka mereka akan menyerukan suara rakyat sangat penting untuk didengar tetapi hal ini hanya dapat didengar selama 5 tahun sekali yaitu saat pemilu atau pilkada saja.

Setelah pesta demokrasi dilaksanakan mereka kembali seperti semula, dan tentu akan ada dampak yang timbul dalam skala yang lebih luas lagi adalah saat adanya pembungkaman suara rakyat menimbulkan rasa apatis terhadap kondisi politik disebagian besar kalangan masyarakat. Tentu hal ini memberikan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya partai hadir untuk memberikan pengetahuan, dan menambah pemahaman dalam berpolitik di masyarakat.

Melihat fungsi mereka adalah sebagai wadah aspirasi yang dalam pemilu yang diwakilkan melalui kader suatu partai untuk mewakili kondisi yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi sayangnya hal ini justru dimanfaatkan oleh sebagian besar politisi dengan menikmati keacuhan rakyat tersebut dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan politik di Indonesia sangat meresahkan. Sehingga perlu ada beberapa upaya agar oligarki di partai politik bisa diredam, salah satunya adalah perbaiki sistem pemasukan atau pengeluaran dalam keuangan partai politik.

Uang memang segalanya dan politik membutuhkan uang, jadi bagaimana cara mengatasinya yaitu melalui sumber pendanaan partai politik harus diatur sedemikian rupa melalui konstitusi yang mengatur ini, contohnya dibuat semacam UU yang mengatur dari mana asal atau sumber dana partai politik bisa dari negara atau dari konstituen dengan jumlah yang dibatasi.

Hal ini bertujuan agar dana tersebut mudah di kontrol atau audit. Dengan memperbaiki sistem ini ketergantungan partai terhadap dukungan pemodal yang dipertukarkan dengan hak khusus menjadi dapat diawasi. Agar budaya kompetisi elektoral yang mahal dalam demokrasi dan tidak transparannya sistem keuangan partai perlahan dapat hilang.

Selain itu benahi sistem rekrutmen di dalam partai untuk menempatkan orang-orang berbakat pada jabatan politik puncak dan pada pemerintahan representatif yaitu dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas politik yang memadai. Dan perlunya meninggalkan jenis partai massa dan berubah menjadi

partai kader, partai ideologi, dll.

Sebab partai yang didalamnya tidak memiliki basis ideologi dan minimnya praktik rekrutmen kader yang solid dapat membuka kesempatan kepada para oligarki untuk menghasilkan terciptanya parlemen pemangsa (*predatory parliament*), dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dan UU.

Melalui cara partisipasi masyarakat hanya bisa dilakukan ketika kesadaran masyarakat untuk mengawasi partai tersebut besar. Sebab seorang politisi tidak bisa diminta untuk baik, tetapi harus dipaksa untuk bisa melakukan hal baik. Oleh karena itu partisipasi masyarakat untuk terus mengawasi proses politik agar tetap berjalan baik dapat dilakukan.

Dengan itu, persaingan yang terjadi didalam partai politik juga menjadi sehat. Lalu regenerasi harus terus berjalan dengan mekanisme pengkaderan yang berjalan lancar. Partai yang demokrasi ialah partai yang ada regenerasi didalam kepengurusan partainya. Selain itu juga soal transparansi, hal ini diperlukan guna merubah sistem keuangan partai yang jelas dan transparan agar oligarki dapat diatasi.

Pada usia kemerdekaan Indonesia yang terbilang cukup lama, nampaknya kita semua masih mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki kondisi sosial dan politik bangsa. Iklim demokrasi yang mestinya subur dalam memberikan kebebasan rakyat/*people freedom* dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, saat ini terancam oligarki politik. Para elite politik telah membajak demokrasi ke arah yang sangat membahayakan masa depan bangsa.

Situasi saat ini benar-benar karut-marut. Kondisi ini terjadi dalam hal penanganan korupsi, penanganan pandemi, politik dinasti, politik uang, kooptasi kebebasan akademik, menyempitnya ruang publik dan kebebasan berbicara, serta komunikasi krisis yang buruk di masa pandemi dan permasalahan lain yang nampaknya masih sangat banyak jika dijelaskan.

Wijayanto Direktur Center for Media and Democracy, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan (LP3ES) mengatakan dalam tulisannya salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi di Indonesia adalah kekuatan oligarki yang cepat terkonsolidasi setelah Reformasi 1998 terutama sejak 2019 di satu sisi dan di sisi lain tergesa-gesanya masyarakat sipil untuk berkonsolidasi dan bersaing dengan mereka .

#### Wajah Oligarki

Konsep Oligarki dapat didefinisikan sebagai sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan akumulasi kekayaan dan otoritas hanya di tangan segelintir elit beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk melihat aspek kemunduran demokrasi dan semakin berkurangnya kesejahteraan masyarakat adalah bagaimana sebetulnya kondisi intitusi politik dan ekonomi di Indonesia, karena pada dasarnya kedua institusi tersebut saling berkaitan.

Acemoglu dan Robinson dalam bukunya *Why Nation Fail* membagi institusi politik dan institusi ekonomi ke dalam dua bentuk:

- (1) institusi politik dan ekonomi yang inklusif dan
- (2) institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif.

Mereka berpendapat bahwa hanya dalam suatu sistem politik yang inklusif adalah mungkin bagi negara-negara untuk mencapai suatu kemakmuran. Negara dengan institusi-institusi politik dan ekonomi ekstraktif cenderung miskin, sedangkan negara-negara

dengan institusi politik dan ekonomi yang inklusif cenderung kaya.

Institusi politik ekstraktif sendiri dapat diartikan bahwa kekayaan dalam hal ini sumber daya di Indonesia akan diakumulasi hanya untuk elit-elit penguasa. Institusi politik yang ekstraktif ditandai dengan terkonsentrasinya kekuasaan politik di tangan segelintir orang tanpa adanya checks and balances, serta lemahnya rule of law. Hal ini sebetulnya dapat kita lihat pada realitasnya di Indonesia yang semakin berkurangnya keseimbangan dari pemerintahan yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan berpengaruh terhadap lemahnya ekonomi.

### **Demokrasi Tanpa (Kepentingan) Rakyat**

Dalam peluncuran buku “Demokrasi Tanpa Demos” yang di inisiasi oleh LP3ES (19/08/2021), problem yang menggerogoti demokrasi di Indonesia saat ini tidak hanya terkait dengan institusi politik dan elite saja, tetapi juga isu lain termasuk lingkungan, budaya, media dan gender. Oleh karenanya penguatan demokrasi menjadi isu yang mendesak untuk mencegah “demokrasi tanpa demos” atau demokrasi yang meninggalkan kepentingan rakyatnya. Pada akhirnya demokrasi hanya digunakan sebagai alat bagi sekelompok oligarki untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Demokrasi telah mengkhianati asal usul makna yang tertanam: demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan.

Jeffrey Winters ilmuwan politik Amerika Serikat di Universitas Northwestern menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan kekayaan oleh oligarki saat ini hanya untuk mempertahankan kekuasaannya yang dipraktikkan bersamaan dengan politik transaksional, (19/08/2021) dalam Webinar LP3ES. Politik transaksional memang menjadi perbincangan yang tak kunjung usai dari waktu ke waktu, hal ini juga yang menjadi ancaman ke depan bangsa terhadap demokrasi.

Tak hanya itu, persoalan kepemilikan tanah juga menjadi hal yang patut menjadi pembahasan, karena semakin maraknya perampasan tanah khususnya di daerah pedesaan dan masyarakat adat. Ward Berenschot dalam webinar LP3ES (19/08/2021), juga menjelaskan bahwa terdapat persengkokolan yang buruk terhadap peraturan hukum dan praktik kolusi, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap warga. Hal tersebut jelas menimbulkan perusahaan berhasil merampas tanah milik warga dan menjadi warga nyaris tanpa hak/rightless.

### **Memahami Oligarki dan Praktiknya di Indonesia**

Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa, baik dari golongan atau kelompok tertentu. Adapun oligarki di Indonesia juga memiliki perkembangannya sendiri.

Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah. Oligarki tidak pernah digunakan sebagai istilah resmi untuk bentuk pemerintahan dan hanya digunakan sebagai kritik. Itu juga sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang

dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Sebuah negara yang dianggap memiliki pemerintahan oligarki juga bisa disebut sebagai oligarki, seperti dalam pandangan orang diluar bangsa yang menganggap bangsa tersebut sebagai oligarki yang menindas. Advertisement Oligarki juga dapat merujuk pada kelas orang yang memiliki kekuasaan dalam sistem. Misalnya, sebuah negara dijalankan oleh oligarki yang terdiri dari beberapa industrialis kuat.

Oligarki Menurut Winters Menurut Profesor Northwestern University Jeffrey A Winters, oligarki dibagi menjadi dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki kekuasaan besar secara sistematis walaupun memiliki status minoritas di dalam sebuah komunitas. Dimensi kedua oligarki punya dasar kekuasaan dan kekayaan material yang sangat sulit untuk diseimbangkan dan dipecah.

Menurut Winters, oligarki dibedakan menjadi dua dimensi. Dimensi pertama, oligarki mempunyai suatu dasar kekuasaan serta kekayaan material yang sangat sulit untuk dipecah dan juga diseimbangkan. Sedangkan dimensi kedua menjelaskan bahwa oligarki mempunyai suatu jangkauan kekuasaan yang cukup luas dan sistemik, meskipun mempunyai status minoritas di dalam sebuah komunitas. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang oligarki harus mempunyai dasar kekuasaan yang sulit dipecah serta jangkauan yang harus sistemik. Untuk memperjelas mengenai oligarki, Winters menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama antara lain, tingkat keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, dan yang terakhir sifat liar atau jinak.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Winters juga membuat empat tipe ideal untuk oligarki, yaitu:

- 1) Oligarki Panglima Oligarki muncul dengan kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukkan satu panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan Appalachia.
- 2) Oligarki Penguasa Kolektif Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di Indonesia.
- 3) Oligarki Sultanistik Oligarki yang terjadi ketika monopoli sarana pemaksaan terletak pada satu tangan oligarki. Terdapat suatu hubungan antara oligarki (patron-klien) dengan oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para oligarki yang lain hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada oligarki utama atau tunggal. Hal ini pernah terjadi di Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto.

- 4) Oligarki Sipil Oligarki ini sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. oligarki hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Sehingga, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis serta melibatkan pemilu. Hal ini terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Sistem Pemerintahan Era Soekarno Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Oligarki:

- 1) Kekuasaan dan uang tak bisa dipisahkan Ciri-ciri ini berfokus pada kekuasaan dan kekayaan yang mempengaruhi masalah politik, motivasi, dan kapasitas, bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Tentunya kekuasaan dan uang tidak akan pernah dapat dipisahkan.
- 2) Kekuasaan dikendalikan oleh kelompok kecil masyarakat Pemerintahan dalam hal ini hanya dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat yang memiliki uang, karena mereka akan sangat mudah masuk dalam pemerintahan hanya dengan punya kekayaan, kedudukan dan uang. Hal ini pernah terjadi saat revolusi industri di Inggris. Orang kaya pada saat itu akan sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan karena punya uang.
- 3) Kesenjangan dan ketidaksetaraan dari sisi materi Dalam sistem pemerintahan ini, orang kaya akan menonjol ketimbang kelompok lain yang tak punya materi. Hal ini biasanya bakal menimbulkan konflik sosial berkepanjangan di masyarakat. Inilah yang menyebabkan kemiskinan meningkat sementara itu pemimpinnya semakin kaya.
- 4) Kekuasaan digunakan untuk mempertahankan kekayaan Penguasa atau pemimpin dalam sistem pemerintahan ini hanya memikirkan mempertahankan kekayaan. Hal ini disebabkan, sistem ini menganut siapa yang punya uang dialah yang akan berkuasa, sehingga mempertahankan kekayaan wajib hukumnya agar tetap berkuasa. Jadi tujuan oligarki hanya mementingkan kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang membuat penguasa yang banyak uang bisa terus berkuasa demi meningkatkan pundi-pundi kekayaannya.

Menurut Para Ahli dan Sejarahnya Oligarki di Indonesia Seperti diketahui, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun, sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, mempunyai tujuan untuk pemeratakan kekuasaan serta ekonomi. Jeffrey Winters yang merupakan analisis politik, mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki, akibatnya sistem demokrasi semakin jauh dari cita-cita serta tujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Winters juga menjelaskan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi. Winters pun menambahkan jika sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum. Oligarki menjadi faktor utama dalam mempengaruhi

ekonomi politik di Indonesia. Oligarki sudah ada sejak masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan terus berlanjut hingga runtuhnya pemerintahan Soeharto, yang semula oligarki sultanistik menjadi oligarki penguasa kolektif. Lantas oligarki tidak hilang begitu saja, justru terdapat penekanan tentang bagaimana kekuasaan oligarki di Indonesia kontemporer. Richard Robison serta Vedi R. Hadiz di dalam bukunya yang berjudul *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. Mereka menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada 1998, oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia.

### **Dampak oligarki terhadap Demokrasi**

Masalah utama demokrasi Indonesia yang utama adalah biaya politiknya yang sangat mahal. Menyebabkan banyak orang yang berkompeten tidak dapat mengikuti pemilu, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Hal ini tentu menjadi permasalahan bersama dari waktu ke waktu setiap kali pemilu dijalankan. Pada akhirnya rakyat hanya dijadikan alat untuk mengejar kepentingan oligarki semata dengan politik transaksional.

Demokrasi semestinya mampu menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos tentu merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif yang kita tahu bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat bukan malah berbalik kepada para pejabat ataupun oligarki politik.

Rilis indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economic Intelligence Unit (EIU) tahun 2020 lalu, menyebut Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi dengan memperoleh nilai 6,3 dan menempati peringkat 64 di dunia sehingga dikategorikan sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*). Rilis indeks tersebut juga memaparkan nilai dari instrumen kebebasan sipil. Dalam instrumen tersebut, Indonesia memperoleh nilai 5,59. Untuk itu dapat dibayangkan bahwa demokrasi di Indonesia akan terus mengalami kemunduran jika tidak adanya peran *actor civil society* sebagai penyeimbang negara dan pasar.

Selain itu penting untuk membangkitkan kembali Institusi politik yang inklusif sebagai sebuah institusi yang tidak untuk menguntungkan segelintir elit yang berkuasa namun sebuah institusi yang dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dalam menuju kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi merupakan hal utama untuk tetap mengahdirkan rakyat / demos. Pendidikan politik sangat diperlukan dalam meningkatkan sikap afeksi, kognitif dan partisipatoris masyarakat.

Oleh Karena itu, menurut Emil Salim dalam webinar LP3ES (19/07/2021), Pendidikan bukan hanya meningkatkan sumber daya manusia, melainkan juga meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh pada kualitas demokrasi. Indeks demokrasi Indonesia berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Karena itu, jika demokrasi mau dikembangkan, syarat mutlaknya adalah kembangkan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita bersama, untuk tetap mencerdaskan rakyat dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia.

## 2. Pengaruh Oligarki terhadap Hak Asasi Manusia

Praktik oligarki mewarnai dinamika sistem politik di Indonesia, terutama jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada Desember 2020. Komnas HAM mengingatkan bahwa praktik oligarki sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Dalam perspektif hak asasi manusia, dampak oligarki dalam Pilkada berpotensi mengesampingkan hak-hak warga negara. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melalui dasar Standar Internasional Tentang Pemilu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijabarkan dalam Komentar Umum 25 Komite PBB untuk Hak Asasi Manusia. Tertulis bahwa "Hak untuk Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Urusan Publik, Hak Memilih dan di Pilih serta Hak atas Kesetaraan Akses dalam Pelayanan Publik".

"Itu bagian dari hak asasi manusia, bagian dari hak sipil politik kita," tegas Taufan dalam "FGD Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktiknya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Komnas HAM RI secara daring, Senin (7/9/2020).

Bagian dari Komentar Umum Komite PBB tersebut juga tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dan mengikat dalam hukum nasional. Faktanya, dominansi kaum elit terhadap kancah perpolitikan di Indonesia, menurut Taufan dapat mengaburkan prinsip equal rights. Jika prinsip ini diabaikan, maka kondisi politik dengan praktik oligarki menjadi isu HAM yang amat serius karena lenyapnya hak untuk dipilih.

"Praktik oligarki dalam berbagai kesempatan mengurangi bahkan meminggirkan prinsip equal rights dalam politik," tegasnya.

Walhasil, hak politik warga negara akan terbatas karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik. Pemilihan kepala daerah pun bakal hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses dalam kekuasaan politik dan ekonomi. Dampaknya, hasil dari proses Pilkada tersebut akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang condong kepada kaum oligarki.

Tak sampai di situ, hak ekonomi warga negara ikut terancam. Indikatornya terlihat dari banyaknya pengaduan terkait kasus agraria yang dilaporkan ke Komnas HAM. "Kami menemukan fakta-fakta aduan yang masuk ke Komnas HAM banyak sekali terkait konflik agraria," ucap Taufan.

Berdasarkan data aduan Komnas HAM untuk periode 2013-2019 terdapat 407 konflik agraria yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dalam konteks ini, oligarki mengambil peran dalam munculnya kebijakan-kebijakan di setiap daerah yang bermuara pada keuntungan ekonomi kaum elit semata.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin menyatakan oligarki menjadi penting untuk dipahami. "Gejala oligarki dalam politik memengaruhi keberlangsungan hak asasi manusia," tegasnya.

Ancaman oligarki yang pertama, apabila masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, penting bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara tepat. Peralnya, kepala daerah terpilih akan menjadi tonggak dalam pemenuhan hak asasi

manusia setiap warganya. Apabila oligarki terus melenggang, hal tersebut akan mengancam keberlangsungan hak asasi itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaruh oligarki terhadap demokrasi di Indonesia sudah memasuki tahap memprihatinkan sebab Demokrasi semestinya mampu menjadi sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konteks ini, demokrasi tanpa demos tentu merupakan anomali, atau bahkan kontradiktif yang kita tahu bahwa seharusnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat bukan malah berbalik kepada para pejabat ataupun oligarki politik. 2) Apabila Oligarki masuk ke dalam proses politik akan menghilangkan hak partisipasi warga negara. Selanjutnya, masuknya oligarki dalam hasil proses politik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Artinya, akan berdampak bagi pemenuhan hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. (2013: 11). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV
- Ismayani Ismayani, Asmaiyani Asmaiyani (2021), Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 KuHPidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(2), 7-14. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/11>
- Asmaiyani Asmaiyani, Ismayani Ismayani (2021), Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(2), 15-23. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/12>
- Sugiyono. Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal.27 dan hal.29.
- Jeffrey A. Winters (2011), Oligarki, Alih bahasa : Zia Anshor, Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syauket, Amalia (2021) Buku Referensi dengan Judul "Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup (Fenomena Pilkada Serentak 2020). Penerbit: Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dalam <https://www.bphn.go.id/data/documents>.
- Abdis Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh (Ed). Oligarki: Teori dan Kritik. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020. Cetakan: I. Halaman: xxiv+291. ISBN: 978-979-1260-95-4.
- Elazhari, 2021. Pengaruh Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SMP Negeri 2 Tanjung Balai, AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS, 1(1), 44-53. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFOSJ-LAS/article/view/7>.

- Muhammad Rajali, Elazhari, Khairuddin Tampubolon, (2021). Pencocokan Kurva Dengan Metode Kuadrat Terkecil dan Metode Gauss. *AFoSJ-LAS: Journal All Field of Science J-LAS*, 1(1), 14-22. From: <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/article/view/9>
- Khairuddin Tampubolon, 2020, Elemen-Elemen Mesin Bensin pada Mobil dan Perawatannya, *Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing)*, 1 Mar 2020 - 346 halaman- URL: [https://books.google.co.id/books/about/Elemen\\_Elemen\\_Mesin\\_Bensin\\_pada\\_Mobil\\_da.html?id=Knf8DwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Elemen_Elemen_Mesin_Bensin_pada_Mobil_da.html?id=Knf8DwAAQBAJ&redir_esc=y).
- Wispi Elbar, Khairuddin Tampubolon, (2020), Pengaruh Campuran Silikon Pada Aluminium Terhadap Kekerasan Dan Tingkat Keausannya, *Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy*, 4(2), 183-196. From: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4070>
- Khairuddin Tampubolon, Fider Lumbanbatu (2020), Analisis Penggunaan Knalpot Berbahan Komposit Untuk Mengurangi Tingkat Kebisingan Pada Motor Suzuki Satria, *Jmemme: Journal Of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials And Energy*, 4(2), 174-182. From: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jmemme/article/view/4065>
- Mahyudin Situmeang, Khairuddin Tampubolon (2020), Pengaruh Etika Administrasi Terhadap Pelananaan Aparat Desa Pada Kantor Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 3(1), 99-107. From: <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/514>
- Immanuel, Yusak. 2015. Oligarki Partai dan Dampak bagi Demokrasi. <https://beritamanado.com/oligarki-partai-dan-dampak-bagi-demokrasi/>  
<http://nagarainstitute.com/oligarki-indonesia-praktik-dan-dampaknya-pada-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan/>  
<https://kolom.tempo.co/read/1497397/bahaya-demokrasi-oligarki>